

PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 6, BD.2026/NO.6

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

- ABSTRAK : - Peraturan Gubernur ini disusun sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Regulasi ini memberikan pedoman sistematis bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola konflik kepentingan yang dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan pejabat pemerintahan..
- Jenis konflik kepentingan yang diatur mencakup konflik aktual maupun potensial, dengan sumber yang meliputi kepentingan bisnis, hubungan keluarga, afiliasi, pekerjaan di luar jabatan pokok, rangkap jabatan, pengaruh dari jabatan lama, penerimaan gratifikasi, serta bentuk lainnya.
 - Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan melalui pembangunan sistem, pelaksanaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi. Instrumen kebijakan yang wajib dimiliki setiap perangkat daerah mencakup identifikasi dan manajemen risiko, komitmen kelembagaan, serta penetapan pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan. Mekanisme teknis meliputi pencatatan kepentingan pribadi, deklarasi konflik aktual, pengendalian oleh atasan pejabat, masa tunggu bagi mantan pejabat, serta pelatihan dan konsultasi.
 - Tujuan utama peraturan ini adalah mencegah penyalahgunaan wewenang, memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kesadaran aparatur sipil negara, serta mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.